



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JAINUDIN ZAMAN
2. Jabatan : PANITERA
3. NHK : 89973

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 840.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 433 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN , HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA HALMAHERA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 437 m2 di KAB / KOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN , Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 46.800.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 50.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 29.400.000
5. MOTOR, YAMAHA YAMAHA R2 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.350.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 50.845.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	677.793
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	938.322.793
III. HUTANG	Rp.	102.704.505
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	835.618.288

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.